

## **RINGKASAN**

### **DEMOKRASI POLITIK DI TINGKAT LOKAL**

**Studi Tentang Respon Elit Masyarakat Sasak Dalam Dinamika Politik  
di Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat**

Oleh : Habib Alwi

Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang demokrasi politik lokal pada komunitas elit Sasak setelah diterapkannya otonomi daerah di Kabupaten Lombok Timur. Sebab kehadiran identitas menjadi penting untuk menempati posisi strategis di lembaga politis maupun di lembaga birokrasi. Dinamika kehidupan sosial politik itu berkembang berkembang setelah bergulirnya reformasi menjadikan masyarakat mampu untuk mengaktualisasikan diri, sehingga harkat dan martabat sebagai warga negara benar-benar mempunyai jati diri yang sesungguhnya.

Gerakan reformasi di pandang sebagai kebangkitan demokratisasi yang sudah lama di tunggu warga negara di Indonesia. Bersamaan dengan gerakan itu, maka lahirlah kebijakan tentang desentralisasi untuk mengatur daerah masing-masing. Dengan demikian maka respon serta peran elit lokal dalam membangun daerah berlomba-lomba menempati posisi strategis di daerah. Adanya desentralisasi berimplikasi pada penguatan identitas etnis, dalam konteks ini adalah etnis Sasak sebagai etnis mayoritas.

Dalam penelitian ini ada tiga permasalahan yang diangkat adalah : pertama, bagaimana respon elit masyarakat Sasak terhadap dinamika politik yang berkembang pasca diterapkannya otonomi daerah di Lombok Timur; kedua, bagaimana peran elit lokal atas kesempatan yang ada di dalam mengisi ruang publik; ketiga, bagaimana pula hubungan antara etnis di tengah pluralisme. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : ingin mengkaji respon elit masyarakat Sasak terhadap dinamika politik yang berkembang pasca desentralisasi di Lombok Timur; ingin memahami bagaimana peran elit lokal atas kesempatan dalam mengisi ruang publik; ingin memahami hubungan antara etnis di tengah pluralisme. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif perspektif fenomenologi. Jumlah informan seluruhnya 17 orang dengan rincian; 3 orang elit birokrasi, 3 orang elit politik, 4 orang elit agama, 3 orang elit intelektual, 2 orang elit ekonomi, 2 orang elit lembaga swadaya masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elit Sasak melakukan bergining merebutkan jabatan politis dan jabatan birokrasi. Hal ini bisa dilihat dari tampilnya 2 orang Sasak jadi Bupati pasca reformasi Pada masa Orde Baru 5 kali pemilihan Bupati berasal etnis non Sasak dan nota bene militer. Sedangkan jabatan birokrasi sudah sebagian besar dipegang orang Sasak di antara 12 Dinas dan 7 Badan hanya 2 dinas dipegang oleh orang luar yang sebelumnya hampir semua jabatan itu dipegang etnis lain. Semua elit Sasak merespon dinamika politik dengan mengambil peran sambil membenahi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam penelitian ini perspektif teori yang digunakan antara lain : Pertama, politik lokal dan dinamika sosial membahas tentang politik lokal dalam kaitannya dengan kekuasaan yang digunakan untuk memimpin suatu masyarakat tertentu. teori kedua, demokrasi pemerintahan lokal membahas demokrasi secara integral.

teori ketiga, Desentralisasi dan Otonomi daerah, dengan memberikan perbedaan desentralisasi ke dalam dua kelompok, yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administrative. teori keempat adalah teori elit. Teori elit ini digunakan untuk menjelaskan dinamika politik elit Sasak dalam pergulatan demokratisasi dan proses politik dalam keterwalikan mereka untuk posisi lembaga politis dan lembaga birokrasi di daerah Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif perspektif fenomenologi. Untuk mendeskripsikan secara mendalam terhadap respon elit masyarakat Sasak terhadap dinamika politik dalam otonomi daerah tersebut.. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat, terutama berbagai hal yang berkaitan dengan akitivitas elit Sasak dalam dinamika sosial politik. Peneliti mewawancarai 17 informan diantaranya; 3 orang elit birokrasi, 3 orang elit politik, 4 orang elit agama, 3 orang elit intelektual, 2 orang elit ekonomi, 2 orang elit LSM. Pemilihan informan ini dilakukan secara purposive, artinya informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elit Sasak melakukan menempati posisi di lembaga politis maupun di lembaga birokrasi. Hal ini bisa dilihat dari tampilnya 2 orang warga Sasak menjadi Bupati setelah bergulirnya reformasi. Pada masa Orde Baru 5 kali pemilihan Bupati berasal etnis non Sasak dan nota bene militer. Sedangkan jabatan birokrasi sudah sebagian besar dipegang orang Sasak di antara 12 Dinas dan 7 Badan hanya 2 dinas dipegang oleh orang luar yang sebelumnya hampir semua jabatan itu dipegang etnis lain. Semua elit Sasak merespon dinamika politik dengan mengambil peran sambil membenahi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan dari data penelitian, bahwa semua elit yang ada melihat suasana yang berkembang setelah adanya otonomi daerah sudah mengarah ke arah demokratisasi dan ini merupakan penentu di dalam meraih masa depan daerah. Pemilihan Umum 2004 lalu berhasil mengantarkan warga masyarakat Sasak duduk sebagai anggota Legislatif dengan jumlah kursi 45 . Data yang ada menyebutkan komposisi anggota DPRD Lombok Timur periode 2004-2008 berdasarkan entisnya, 41 orang berasal dari etnis Sasak, hanya 2 orang berasal dari etnis Sumbawa dan 2 orang berasal dari luar etnis yang ada di NTB. Pada masa Orde Baru dari 45 kursi yang tersedia hanya separuhnya bisa didapatkan. Elit-elit Sasak menginginkan adanya keterwakilan yang adil untuk menepati posisi pada lembaga politik dan lembaga birokrasi. Setelah adanya otonomi daerah, jabatan publik seperti jabatan ketua partai, ketua KPU, dan ketua DPRD semuanya dipegang oleh masyarakat Sasak. Sementara pada masa Orde Baru semua jabatan-jabata tersebut tidak bisa untuk di akses. Kondisi seperti itu menjadikan masyarakat Sasak termarjinalkan dan terhegemoni oleh sistem kekuasaan Orde Baru. Otonomi daerah merupakan angin surga bagi masyarakat di daerah, sebab demokrasi dan politik lokal berkembang sesuai dengan budaya masyarakatnya. Tampilnya orang Sasak menjabat sebagai Gubernur, Bupati tentu menjadi dambaan masyarakat Sasak. Hal ini di akui oleh semua elit masyarakat Sasak tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan SDM nya.

Membangun hubungan sinergis itu harus tetap dibina dan potensi-potensi yang dimiliki sebaiknya diakomodasi. Sebab perlu diketahui bahwa hidup di tengah-tengah multi etnik merupakan suatu sunnatullah dan tidak seoranpun bisa pungkiri. Kehadiran etnis lain mempunyai komitmen untuk membangun daerah ini sama dengan penduduk asli yang ada di Lombok Timur. Dengan demikian maka sudah selayaknya interaksi antara etnis dibangun secara harmonis dan penuh kedamaian sehingga tercipta suatu komunitas yang menghormati pluralisme.

Membangun hubungan sinergis itu harus tetap dibina dan potensi-potensi yang dimiliki sebaiknya diakomodasi. Sebab perlu diketahui bahwa hidup di tengah-tengah multi etnik merupakan suatu sunnatullah dan tidak seorangpun bisa pungkiri. Kehadiran etnis lain mempunyai komitmen untuk membangun daerah ini sama dengan penduduk asli yang ada di Lombok Timur. Dengan demikian maka sudah selayaknya interaksi antara etnis dibangun secara harmonis dan penuh kedamaian sehingga tercipta suatu komunitas yang menghormati pluralisme. Masyarakat Sasak di Lombok Timur yang mayoritas penduduknya adalah Muslim tentu harus mengembangkan dan menerapkan ajaran agama dengan menghormati, toleran terhadap suku-suku lain, karena itu salah satu dari ajaran yang dipegang dalam Islam sehingga terjalin pola hubungan yang sinergis antara etnis.

## **SUMMARY**

### **LOCAL POLITIC OF DEMOCRACY**

#### **Study About Respon Elite Society of Sasak In Political Dynamics in Lombok Island East Province West Nusa Tenggara**

By : Habib Alwi

Attention focus in this research is explore about local political democracy elite community of Sasak after applying decentralization in Lombok island East. Because attendance of identity become important to occupy strategic position to political institute and also bureaucracy institute. Dynamics life of that political social expand to expand after him reform make society can for the actualization of self, so that prestige and standing as citizen really is having of spirit truthfully.

Reform movement at view as democratization evocation which have old in waiting citizen in Indonesia. At the same time with that movement, so delivering birth policy about decentralization to arrange each area. And than so respon and also role of local elite in developing area to bargaining occupy strategic position. Existence of decentralization have implication to reinforcement of ethnic of identity, in this context is ethnic of Sasak as majority.

This research there is three problems : How society elit respon of Sasak to political dynamics which expand after decentralization in Lombok island East ; How role of local elite of opportunity exist in public spare; and how relation between ethnical in the middle of pluralisme. While The purpose this research is : wish to study society elite respon of Sasak to political dynamics which expand after decentralization in Lombok island East; wish to understand how role of local elite of opportunity in public spare ; wish to comprehend relation between ethnic in the middle of pluralism. The used method is approach qualitative method phenomenology perspective

This perspective research used theory for example is : First, local politics and social dynamics study about local politics in its bearing with power used to lead an certain society. Where that power does not only relied on ability but also by other factor which have bearing with existence of pertinent area or society. Therefore there is two factor influence life of local politics Indonesia society that is system of cultural trust system. The second theory is, local governance democracy study democracy comprehenship.

The third theory, Decentralization and Autonomy area. With giving difference of decentralization into two group, that is political decentralization and decentralization of administrative. The fourth theory is, elite theory. This elite theory used to explain political dynamics elite of Sasak in political process and democratization in filling public position and also bureaucracy career position that happened during taking place decentralization in this time at Lombok island East.

This research use approach method qualitative phenomenology perspective. For description exhaustively to society elite respon of Sasak to political dynamics in area autonomy.. With this approach expected by empirical finding early description more detail, more clear , and more accurate, especially matters related to community elite of Sasak in political dynamics. Researcher have to interview 17 informan namely; 3 people from bureaucracy elite, 3 people from political elite, 4 people from religion elite, 3 people from intellectual elite, 2 people from economic elite , 2 people from Non Government Organized elite (NGO).

Result of this research indicated that elite of Sasak fight for bargaining to political position and bureaucracy position. This matter can be see from appear 2 people of Sasak become Government office after reform. Because a New Order period 5 times election of Government office come from outsider ethnic Sasak and from military. While Occupy an bureaucracy have most occupy by people of Sasak among 12 leader on duty and 7 leader on agency, only 2 duty to take hold by previous outsider most of all that position and take hold of other ethnic. All elite of Sasak political dynamics respons with role take over at the same time correct and improve the quality of Human Resource.

Building relation of mutual that have to remain to be constructed and potency had better accommodate. Cause it is important to know that medial life of ethnic multi represent an sunnatullah. other Ethnical attendance have komitmen to develop building this area is equal tol exist in Lombok island East. There is on the right track to interaction between woke up ethnical harmony and peacefulness so that created by a community respecting pluralism. Society of Sasak in Lombok island East which its majority Moslem of course have to develop and apply religion teaching by respecting, as consequence one of the teach which is hold in Islam so that relation pattern which mutual between ethnics.

**ABSTRACT**  
**LOCAL POLITIC OF DEMOCRACY**  
**Study About Respon Elite Society of Sasak in Political Dynamics in**  
**Lombok Island East Province West Nusa Tenggara**

By : Habib Alwi

Attention focus this research is explore about local political democracy elite community of Sasak after applying decentralization in Lombok Island East. Because attendance of identity become important to occupy strategic position to political institution and also bureaucracy institution. Dynamics life of that political social expand after reform make society can for the actualization of self, so that prestige and standing as citizen really is having actually identity. Reform movement at view democratization evocation which have old waiting citizen in Indonesia. At the same time with that movement, policy about decentralization to arrange other area. that way, respon and also role of local elite in developing area use occupy strategic position. Existence of decentralization have implication to reinforcement of ethnical identity, in this context is ethnical of Sasak as ethnical majority.

In this research there is three problems raise : How society elite respon of Sasak to political dynamics which expand after decentralization in Lombok island East area; how role of local elite of opportunity exist in filling public spare; and how also relation among ethnical in the middle of pluralism. Purpose this research is : study society elite respon of Sasak to political dynamics which expand after decentralize in Lombok island East;; understand relation among ethnical in the middle of pluralisme. This research use approach method qualitative phenomenology perspective. Researcher have to interview 17 informan namely; 3 people from bureaucracy elite, 3 people from political elite, 4 people from religion elite, 3 people from intellectual elite, 2 people from economic elite , 2 people from Non Government Organized elite (NGO) This research spand time four month start April to july.

Result of this research indicated that elite Sasak fight for bargaining to political position and bureaucracy position. This matter can be see from appear 2 people of Sasak become Government office after reform. Because a New Order period 5 times election of Government office come from outsider ethnic Sasak and from military. While Occupy an bureaucracy have most occupy by people of Sasak among 12 leader on duty and 7 leader on agency, only 2 duty to take hold by previous outsider most of all that position and take hold of other ethnic. All elite of Sasak political dynamics respons with role take over, at the same time correct and improve quality of Human Resource.

**Keyword :** Democracy, local political, elite, decentralization, political of identity.